



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Rektor

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR: 178/HP/KRK/2014

TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
TAHUN 2014

Menimbang :

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual lulusan Universitas Atma Jaya Yogyakarta agar mampu bersaing untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga profesional dalam bidang Hukum di tingkat Nasional maupun Internasional, maka saat ini perlu dilakukan penyesuaian kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Memperhatikan :

Surat Direktur Program Pascasarjana Nomor 140/I tanggal 30 Juni 2014 tentang Permohonan Keputusan tentang Kurikulum Baru Prodi MIH untuk Diberlakukan Mulai September 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Menetapkan Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2014.

Kedua :

Kurikulum dan susunan mata kuliah Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga :

Memberikan wewenang kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk menetapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan diktum Pertama Keputusan ini.

Keempat :

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Kurikulum yang pernah ada sebelum Keputusan ini diberlakukan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kelima :

Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan September 2014.

Keenam :

Segala sesuatunya akan ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

Salinan :

1. Warek I
2. Dir. Pascasarjana



Dr. R. Maryatmo, MA.



LAMPIRAN:

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN 2014

A. PENDAHULUAN

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJY terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UAJY Nomor 36/HP/2008. Untuk mendukung tujuan pendidikan UAJY yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, kebutuhan masyarakat atau pengguna jasa di era kompetisi dan globalisasi, maka kurikulum Program Studi MIH UAJY (PSMIH UAJY) perlu dievaluasi, serta diubah dan/atau kembangkan secara periodik.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana UAJY Nomor 097/In/I tertanggal 1 Mei 2014 telah dibentuk Tim Peninjauan Kembali Kurikulum PSMIH UAJY, yang bertugas meninjau, mengajukan usulan kurikulum yang baru, dan melaporkan hasilnya untuk ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Penyusunan Kurikulum UAJY (Keputusan Rektor No.101/KSDM/2013) serta KepMendiknas No.045/U/2002, tertanggal 2 April 2002, Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum UAJY tahun 2014 ini disusun sebagai berikut.

B. NAMA PROGRAM STUDI

C. TUJUAN PROGRAM STUDI DAN CIRI KHAS KOMPETENSI UTAMA LULUSAN

Tujuan Prodi MH sesuai visinya adalah menjadi Prodi MH yang menciptakan ahli-ahli hukum yang unggul, mempunyai pemahaman teoretis yang baik, berwawasan global, inklusif dan humanis, serta mampu mengimplementasikan keahliannya melalui pelayanan dalam cahaya kebenaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Kompetensi lulusan Prodi MIH Pascasarjana UAJY adalah:

1. Kompetensi Utama:

- a. Lulusan mampu **mengembangkan** pengetahuan di bidang ilmu hukum melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif yang teruji di bidang hukum
- b. Lulusan mampu **memecahkan** permasalahan dalam bidang hukum melalui pendekatan inter atau multi disipliner.
- c. Lulusan mampu mengelola riset dan pengembangan ilmu hukum yang **bermanfaat** bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan **nasional maupun internasional**.

2. Kompetensi Pendukung

- a. Lulusan mampu memberikan **solusi hukum** terhadap persoalan persoalan **bisnis** yang muncul dalam praktek.
- b. Lulusan mampu memberikan **solusi hukum** terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan **ketatanegaraan**.
- c. Lulusan mampu memberikan **solusi hukum** terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan **agraria/sumber daya alam**.

- d. Lulusan mampu memberikan **solusi hukum** terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan **penegakan hukum**.

3. Kompetensi Lainnya

- a. Lulusan mampu membangun **perilaku etis** sebagai ahli hukum bisnis, agraria/sumber daya alam, ketatanegaraan dan sistem peradilan pidana.
- b. Lulusan mampu membangun **relasi** dalam dunia kerja, komunikasi dan kerjasama secara handal dan global.
- c. Lulusan mampu merealisasikan nilai-nilai **religiositas**.

D. FASILITAS UTAMA PROGRAM STUDI

Untuk mencapai kompetensi tersebut, fasilitas utama yang diberikan adalah: ruang kuliah, ruang diskusi/seminar/ujian tesis, fasilitas internet dan wi-fi, perpustakaan on-line, penyelenggaraan perkuliahan, diskusi, seminar, character building, company visit, penelitian serta penulisan tesis, dibawah pengajaran dan/atau bimbingan para dosen yang berkompeten di bidangnya.

E. PERSYARATAN AKADEMIK DOSEN DAN MAHASISWA

Untuk mencapai kompetensi lulusan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Pasal 46 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 19(3) UU 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi, Pasal 31 (1)c PP 19/2005 ttg Standar Nasional Pendidikan, serta Lampiran Permen PAN No.46 Tahun 2013, maka kualifikasi atau persyaratan akademik dosen pada Prodi MH Pascasarjana UAJY adalah mereka yang telah memiliki kualifikasi pendidikan Doktor, dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor, kecuali dosen tamu yang berasal dari praktisi.

Calon peserta yang diterima untuk studi pada Prodi MH pada umumnya adalah lulusan Sarjana Hukum. Calon peserta dari lulusan sarjana non

hukum dapat diterima dengan wajib mengikuti mata kuliah matrikulasi yang berisi substansi pengenalan Ilmu Hukum.

F. GELAR LULUSAN, JUMLAH SKS, WAKTU TEMPUH

Pendidikan Prodi Magister Hukum adalah pendidikan akademik. Lulusan Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana UAJY adalah Magister Hukum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) KepMendiknas RI No.232/U/2000, Jumlah beban studi yang harus ditempuh untuk dapat lulus sebagai Magister humaniora adalah 36 SKS termasuk tesis, dan dijadwalkan dalam waktu 3 (tiga) semester) dalam satu tahun untuk peserta full-time, atau 6 (enam) semester dalam dua tahun untuk peserta part-time, dengan batas waktu studi 3 (tiga) tahun untuk peserta full-time, atau 5 (lima) tahun untuk mahasiswa part-time.

G. STRUKTUR MATA KULIAH

Struktur Mata Kuliah Magister Hukum adalah sebagai berikut.

I. Mata Kuliah Inti

Mata kuliah inti berjumlah 22 SKS, yang merupakan mata kuliah dasar dan utama yang wajib ditempuh oleh seluruh peserta untuk mencapai kompetensi utama yakni mengembangkan ilmu dan karya inovatif, melakukan riset, memecahkan permasalahan secara inter atau muliti disipliner dalam bidang hukum secara umum, serta kompetensi lainnya, yakni membangun relasi dan komunikasi dengan dunia kerja. Mata kuliah inti terdiri dari:

No.	Kode	Nama mata Kuliah	SKS
1.	HKN600	Tecori Hukum	3

2.	HKN610	Filsafat Hukum	2
3.	HKN620	Sosiologi Hukum	3
4.	HKN630	Metodologi Penelitian Hukum	3
5.	HKN640	Sejarah Hukum	2
6.	HKN650	Politik Hukum	3
7.	HKN900	Tesis	6
8.	PPS01	<i>Outward bound</i>	0
9.	PPS02	<i>Character Building</i>	0
10.	PPS03	<i>Company Visit/Field Study</i>	0
11.	PPS04	Kuliah Umum	0

II. Mata Kuliah Konsentrasi

Profil lulusan Program Studi Magister Ilmu UAJY antara lain sebagai berikut.

1. Akademisi
2. peneliti hukum
3. Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat)
4. Konsultan hukum perusahaan
5. Law firm
6. Pejabat pemerintahan
7. Legislator

Dalam menciptakan profil lulusan yang berkompeten, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UAJY menawarkan 4 (empat) konsentrasi studi, yakni konsentrasi hukum bisnis, hukum agraria, hukum ketatanegaraan, serta litigasi.

Mata Kuliah Konsentrasi merupakan mata kuliah yang harus ditempuh lulusan mempunyai kompetensi untuk memberikan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan bisnis yang muncul dalam praktek; persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan; persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agraria/sumber daya alam; persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penegakan hukum; serta lulusan mampu membangun perilaku etis sebagai ahli hukum. Mata kuliah konsentrasi yang harus ditempuh oleh peserta

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	HBS700	Hukum Perdagangan Internasional	2
2	HBS710	Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi	2

berjumlah 14 SKS, terdiri dari 4 SKS mata kuliah wajib yang sudah ditentukan, dan 10 SKS mata kuliah pilihan yang dapat dipilih sendiri oleh peserta dari berbagai mata kuliah yang ditawarkan, sesuai focus kajian peserta.

Mata kuliah wajib konsentrasi Hukum Bisnis (4 SKS) terdiri dari:

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Hukum Agraria (4 SKS) terdiri dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	HAG700	Politik Hukum Agraria	2
2	HAG705	Sejarah Perkembangan Hukum Agraria	2

Mata kuliah Wajib Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan (4 SKS) terdiri dari:

No.	Kode	Nama mata Kuliah	SKS
1	HTN810	Hukum Konstitusi	2
2	HTN805	Negara Hukum, HAM, dan Demokrasi	2

Mata kuliah Wajib Konsentrasi Litigasi. (4 SKS) terdiri dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	HLT701	Sistem Peradilan di Indonesia	2
2	HLT702	Perbandingan Sistem Peradilan	2

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis (10 SKS) dapat dipilih dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	HBS00	Hukum Perusahaan	3
2.	HBS820	Hukum Investasi dan Pasar Modal	3
3.	HBS805	Penyusunan Kontrak Bisnis	2
4.	HBS810	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2
5.	HBS815	Hukum Persaingan dan Perlindungan Konsumen	3
6.	HBS830	Hak atas Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi	3
7.	HBS835	Hukum Perbankan	2
8.	HBS850	Hukum Pajak	2
9.	HBS840	Etika Bisnis	2
10.	HBS825	Hukum Lingkungan	2

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Hukum Agraria (10 SKS), dapat dipilih dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	HAG805	Hukum Penataan Ruang	3
2.	HAG810	Sistem Administrasi Pertanahan	3
3.	HAG815	Pemilikan dan Penguasaan Tanah	3
4.	HAG825	Perbandingan Hukum Agraria	2
5.	HAG821	Hukum Pertambangan	2
6.	HBS850	Hukum Pajak	2
7.	HAG822	Hukum Sumber Daya Alam	2
8.	HAG823	Hukum Kehutanan	2
9.	HTN820	Hukum dan Kearifan Lokal	3
10.	HBS825	Hukum Lingkungan	2

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan (10 SKS), dapat dipilih dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	HTN815	Legislative Drafting	3
2.	HTN820	Hukum dan Kearifan Lokal	3
3.	HTN835	Hukum Perbendaharaan dan Keuangan Negara	3
4.	HTN850	Perjanjian Internasional	2
5.	HTN821	Perbandingan Sistem Ketatanegaraan	2
6.	HTN823	Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan	3
7.	HTN800	Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2
8.	HBS850	Hukum Pajak	2
9.	HTN822	Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	2
10.	HTN825	Hukum & Etika Birokrasi Pemerintahan	2

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Litigasi (10 sks), dapat dipilih dari:

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1.	HLT710	Pengakuan HAM	3
2.	HBS810	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2
3.	HTN823	Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan	3
4.	HLT711	Pemberantasan Korupsi	3
5.	HLT715	Hukum dan Keadilan Sosial	2
6.	HLT712	Eksaminasi Putusan	2
7.	HLT713	Ilmu Pengetahuan Forensik	2
8.	HLT714	Penyelesaian Sengketa Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	2
9.	HLT717	Sistem Sanksi/Hukuman	2
10.	HLT716	Cyber Law	3

H. TAHAPAN PENGAMBILAN MATA KULIAH

1) PROGRAM PENUH WAKTU

Semester 1 (12 sks)

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Teori Hukum | 3 sks |
| 2. Politik Hukum | 3 sks |
| 3. Filsafat Hukum | 2 sks |
| 4. Sejarah Hukum | 2 sks |

5. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi I 2 sks

Semester 2 (13 sks)

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 1. Metodologi Penelitian Hukum | 3sks |
| 2. Sosiologi Hukum | 3sks |
| 3. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 2 | 2sks |
| 4. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 1 | 2sks |
| 5. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 2 | 3sks |

Semester 3 (11 sks)

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 1. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 3 | 3sks |
| 2. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 4 | 2sks |
| 3. Tesis | 6sks |

2) Program Paruh Waktu

Semester 1 (8 sks)

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Teori Hukum | 3 sks |
| 2. Politik Hukum | 3 sks |
| 3. Filsafat Hukum | 2 sks |

Semester 2 (5 sks)

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Sosiologi Hukum | 3 sks |
| 2. Mata kuliah wajib Konsentrasi 1 | 2 sks |

Semester 3 (6 sks)

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Sejarah Hukum | 2 sks |
| 2. Matakuliah Wajib Konsentrasi 2 | 2 sks |
| 3. Matakuliah Pilihan Konsentrasi 1 | 2 sks |

Semester 4 (5 sks)

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 2 | 3sks |
| 2. Matakuliah Pilihan Konsentrasi 3 | 2 sks |

Semester 5 (6 sks)

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Metodologi Penelitian Hukum | 3 sks |
| 2. Matakuliah Pilihan Konsentrasi 4 | 3sks |

Semester 6 (6 sks)

- | | |
|----------|------|
| 1. Tesis | 6sks |
|----------|------|

I. Masa Berlaku, Transisi dan Konversi

Masa Berlaku Kurikulum baru: Mulai September 2014 untuk mahasiswa Angkatan September 2014 ke atas.

Masa transisi: Untuk mahasiswa angkatan sebelum September 2014, masih berlaku Kurikulum lama hingga Agustus 2015. Khusus mahasiswa part time masa berlaku hingga Desember 2015.

Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum lulus pada tanggal 1 September 2015 diberlakukan Kurikulum baru 2014.

Untuk pengambilan mata kuliah masa transisi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Materi yang diajarkan sedapat mungkin disesuaikan dengan Kurikulum 2014 dan Silabus terbaru.
2. Mata Kuliah Hukum Lingkungan Kurikulum 2014 (2sks) digabung dengan Mata kuliah Hukum Lingkungan dan Perizinan kurikulum 2008 (3 sks) dengan ketentuan: Mahasiswa pengambil Hukum Lingkungan Kurikulum 2014 hanya wajib kuliah 10 kali, pengambil Hukum Lingkungan dan Perizinan wajib kuliah 14 kali.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah tidak ditawarkan kembali, mahasiswa dipersilahkan mengambil mata kuliah pilihan lainnya.
4. Kuliah Hukum Penatagunaan tanah atau Hukum Penatagunaan Ruang Kurikulum 2008 (2 sks) digabung dengan kuliah Hukum Penataan Ruang Kurikulum 2014 (3 sks), dengan ketentuan mahasiswa pengambil Hukum Penatagunaan Tanah atau Hukum Penatagunaan Ruang Kurikulum 2008 hanya wajib hadir 10 kali. Mahasiswa pengambil Hukum Penataan Ruang Kurikulum 2014 wajib hadir 14 kali.
5. Mata kuliah Pengurusan Hak atas Tanah atau Pendaftaran Tanah Kurikulum 2008 (3 sks) digabung dengan mata kuliah Sistem Administrasi Pertanahan Kurikulum 2014 (3 sks).

6. Mata kuliah Perbandingan Hukum Pertanahan Kurikulum 2008 (2 sks) digabung dengan mata kuliah Perbandingan Hukum Agraria Kurikulum 2014 (2 sks)
7. Mata kuliah *Legal Drafting* Kurikulum 2008 digabung dengan kuliah *Legislative Drafting* Kurikulum 2014
8. Mata kuliah Hukum Perbendaharaan Negara atau Hukum Keuangan Negara kurikulum 2008 (2 sks) digabung dengan mata kuliah Hukum Perbendaharaan dan Keuangan Negara Kurikulum 2014 (3 sks).
9. Penyelesaian Sengketa Hukum Kurikulum 2008 (2 sks) digabung dengan Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan Kurikulum 2014 (3 sks) dengan ketentuan mahasiswa pengambil Penyelesaian Sengketa Hukum hanya wajib hadir 10 kali, mahasiswa pengambil Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan wajib hadir 14 kali.

Konversi:

Apabila pada 1 September 2015 mahasiswa angkatan sebelum September 2014 belum lulus, diberlakukan ketentuan Kurikulum baru dengan konversi sebagai berikut.

1. Hukum Lingkungan dan Perizinan (3 sks), dikonversi menjadi Hukum Lingkungan (2 sks), sehingga kekurangan sks harus diambil dari mata kuliah pilihan lainnya.
2. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Penatagunaan Tanah dan Hukum Penataan Ruang, salah satu dikonversi menjadi Hukum Penataan Ruang (3 sks), sehingga mahasiswa kelebihan 1 sks
Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Penatagunaan Tanah (2 sks) atau Hukum Penataan Ruang (2 sks), dikonversi menjadi Hukum Penataan Ruang 3 sks, sehingga mahasiswa kelebihan 1 sks.
3. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendaftaran Tanah (2 sks) dan Pengurusan Hak Atas Tanah (2 sks), salah satu dikonversi

menjadi Sistem Administrasi Pertanahan (3 sks), sehingga mahasiswa kelebihan 1 sks

Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendaftaran Tanah (2 sks) atau Pengurusan Hak Atas Tanah (2 sks), dikonversi menjadi Sistem Administrasi Pertanahan 3 sks, sehingga mahasiswa kelebihan 1 sks.

4. Mata kuliah Perbandingan Hukum Pertanahan, dikonversi menjadi mata kuliah Perbandingan Hukum Agraria.
5. Hukum Jaminan Atas Tanah hapus, sehingga bagi yang sudah mengambil dipersilahkan menambah mata kuliah pilihan yang baru apabila sks belum memenuhi.
6. *Legal drafting* dikonversi menjadi *legislative drafting*.
7. Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Perbendaharaan Negara (2 sks) dan Hukum Keuangan Negara (2 sks), salah satu dikonversi menjadi Hukum Perbendaharaan dan Keuangan Negara (3 sks), sehingga mahasiswa kelebihan 1 sks
Bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Perbendaharaan Negara (2 sks) atau Hukum Keuangan Negara (2 sks), dikonversi menjadi Hukum Perbendaharaan dan Keuangan Negara 3 sks, sehingga mahasiswa kelebihan 1 sks.